



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) JAKARTA  
Jl. Percetakan Negara No. 23A Jakarta Pusat 10570  
Telp. : (021) 4240406, 42882249, Fax. : (021) 4244168, 42882237  
Email : kontak@bpfkjakarta.or.id – Website : https://bpfkjakarta.or.id



Nomor : PR.05.04/D.LIII/1377/2024  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
BPFK Jakarta Tahun 2023

30 Januari 2024

**Yth. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan RI  
di  
Tempat**

Bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengamanan  
Fasilitas Kesehatan Jakarta,



Subadri, ST.M.Si.  
NIP.197611122005011003



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

Jl. Percetakan Negara No. 23 A Jakarta Pusat 10570 Indonesia  
Telepon (021) 4240406, 42882249  
Email : [kontak@bpfkjakarta.or.id](mailto:kontak@bpfkjakarta.or.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat Nya Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. Laporan ini merupakan bagian dari upaya Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sesuai PMK No. 28 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan yang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan melalui perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada tahun 2023 serta dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2024  
Kepala Balai Pengamanan Fasilitas  
Kesehatan Jakarta,



  
Subadri, ST.M.Si.  
NIP.197611122005011003

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta ini merupakan salah satu media penyampaian capaian kinerja yang telah dirangkum sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun Anggaran 2023 kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan KMK No. 5/KMK.05/2023 tanggal 16 Januari 2023 BPFK Jakarta ditetapkan menjadi Satker Pengelola Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 ada perubahan atau perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) jika dibandingkan dengan tahun 2022, Indikator kinerja utama pada tahun 2023 ada 14 indikator kinerja utama dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan, dari hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 terdapat 11 indikator kinerja utama yang mencapai target bahkan melebihi diantaranya yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 81 tercapai 81 atau (100%).
2. Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi target 85 tercapai 98 atau (115,29%).
3. Realisasi Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan target 221 tercapai 297 atau (134,39%).
4. Ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM target 70% tercapai 72% atau (103%).
5. Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator target 95% tercapai 100% atau (105,26%).
6. Pertambahan jumlah personil yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan sertifikat kelulusan sesuai kompetensinya target 85% tercapai 100% atau (118%).
7. Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan target Rp Rp19.509.103.000,- tercapai Rp25.803.012.028,- atau (132%).
8. Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional target 1 tercapai 1 layanan (100%).

9. Ketepatan waktu pelayanan target 80% tercapai 86% atau (108%)
10. Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital target 1 sistem tercapai 1 sistem atau (100%).
11. Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU target 95% tercapai 147% atau (155%).

Pagu anggaran DIPA Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 74.855.817.000,- terdiri dari : Rupiah Murni (RM) sebesar Rp55.729.612.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp19.126.205.000,-.

Realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp73.178.917.212,- atau sebesar (97,76%), realisasi sumber dana dari rupiah murni sebesar Rp55.382.597.508,- atau sebesar (99,38%), realisasi sumber dana dari PNBP BLU sebesar Rp17.796.319.704,- (93,05%).

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksklusif	3
Daftar Isi	5
Bab I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Penjelasan Umum Organisasi	7
C. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	9
D. Aspek Strategis Organisasi serta permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi	9
E. Sistematika Penulisan	11
Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja	13
II.1 Perencanaan Kinerja	13
II.2 Perjanjian Kinerja	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19-51
A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	
A.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
A.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)	
A.5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.	
A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
 BAB IV PENUTUP	 52
 LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja	 53
2. Realisasi Anggaran	55-63
3. SK Tim LAKIP	64-66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan sistem kerja pemerintahan secara bijaksana, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Direktur Pelayanan Kesehatan bersama Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, terdiri atas 9 (sembilan) sasaran program, yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, a. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi, b. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA, Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum, Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPAFK Jakarta, Meningkatnya pendapatan melalui produktifitas pelayanan, Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPAFK secara optimal, Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan, Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan, dan Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum. Adapun Indikator Kinerja Utama untuk sasaran program tersebut terdiri dari 14 (Empat belas) indikator, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi
3. Jumlah ruang lingkup pelayanan
4. ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM
5. Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator
6. Peningkatan kompetensi pada SDM
7. Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan

8. Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional
9. Ketepatan waktu pelayanan
10. Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital
11. Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU
12. Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni
13. Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU
14. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023. Di samping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta di masa yang akan datang.

## **B. Penjelasan Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, BPAFK adalah UPT yang melaksanakan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan yang dipimpin oleh pejabat administrator.

Tugas dan Fungsi UPT bidang PAFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat fasilitas kesehatan, selain itu tugas UPT PAFK juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian dilingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Tugas pokok Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan

pemerintah maupun swasta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menyelenggarakan fungsi :

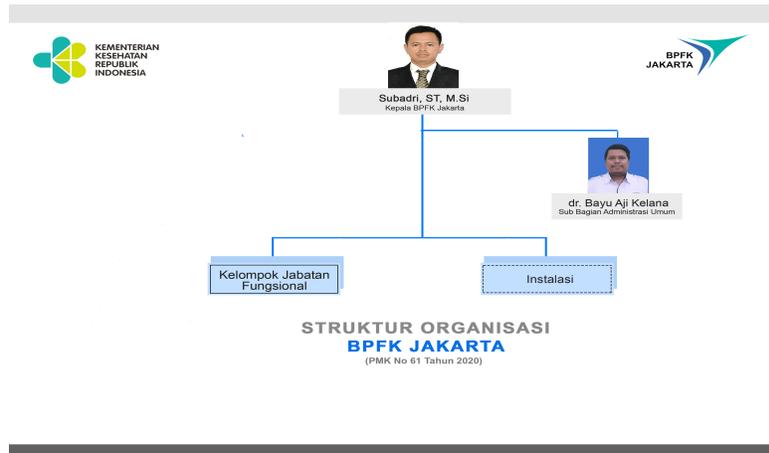
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
3. Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
4. Kalibrasi alat ukur standar;
5. Pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga;
6. Pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
7. Inspeksi sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pengujian alat kesehatan;
8. Inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
9. Inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
10. Pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
11. Pelaksanaan kerjasama Pelaksanaan Bimbingan teknis;
12. Pengelolaan data dan informasi;
13. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
14. Pelaksanaan urusan administrasi BPAFK

Susunan organisasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta tersebut terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BPAFK;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang PAFK sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional

diatur oleh Kepala UPT Bidang PAFK sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :



### C. Aspek Setrategis Organisasi serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

1. Aspek strategis organisasi pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta antara lain :
  - a. Memberikan pelayanan pengujian/kalibrasi alat Kesehatan dan alat ukur yang ada di fasilitas Kesehatan dasar sampai dengan rujukan, Institusi penguji alat Kesehatan swasta atau milik pemerintah daerah, produsen alat Kesehatan, dan distributor alat kesehatan.
  - b. Membina balai pengujian fasilitas kesehatan dan Institusi Penguji swasta, laboratorium kalibrasi internal rumah sakit dan laboratorium kalibrasi di dinas propinsi dan kabupaten kota di wilayah binaan yang sudah ditetapkan pemerintah.
  - c. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan dengan radiasi pengion dan proteksi radiasi sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh fasyankes.

- d. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui uji produk alat kesehatan untuk mendapatkan izin edar alat Kesehatan di Indonesia.
  - e. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan bertanggungjawab.
2. Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi adalah :
- a. Terbitnya kebijakan dari Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mewajibkan adanya sertifikasi CPAKB atau CDAKB bagi produsen dalam negeri.
  - b. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
  - c. Menjadi rujukan nasional dalam bimbingan teknis, pelatihan, pengujian kalibrasi peralatan kesehatan ditengah beragamnya standar acuan dalam pengujian kalibrasi alat kesehatan. Apalagi jumlah institusi penguji swasta terus meningkat.
  - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPAFK untuk mampu mengoptimalkan pelayanan pengujian/kalibrasi, proteksi radiasi dan inspeksi diseluruh fasyankes.
  - e. Perkembangan teknologi kesehatan yang menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) BPAFK untuk terus meningkatkan kompetensinya.
  - f. Jumlah fasyankes yang terus meningkat sehingga konsumen yang dilayani juga meningkat.
  - g. Meningkatnya jumlah alat kesehatan setiap tahun akan meningkatkan juga permintaan pelayanan kalibrasi.
  - h. Memenuhi kebutuhan peralatan dan standar acuan untuk uji dan kalibrasi.
  - i. Memenuhi permintaan uji produk alat kesehatan produksi dalam negeri.
  - j. Perencanaan perubahan sistem pengelolaan keuangan dari Non BLU menjadi sistem pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

## **D. Sistematis**

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta selama tahun 2023, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan satu tahun.

Dari analisis atas capaian kinerja diharapkan dapat diidentifikasi berbagai informasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan demikian Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issud*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II     Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III    Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada);

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta capaian langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Berdasarkan KMK No. 5/KMK.05/2023 tanggal 16 Januari 2023 BPFK Jakarta ditetapkan menjadi Satker Pengelola Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis BPFK mengalami perubahan untuk indikator kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2022, Indikator kinerja utama pada tahun 2023 ada 14 indikator kinerja utama.

Dalam rencana kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta tahun 2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPFK Jakarta dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi, adapun Visi dan Misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :

**Visi :**

**“Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”**

**Misi :**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi BPFK Jakarta yang menggambarkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPFK Jakarta. Adapun misi BPFK Jakarta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini;
2. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan;

3. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta melaksanakan perencanaan kinerja melalui proses penetapan kinerja dalam satu tahun anggaran 2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Setelah BPFK menjadi satker PPKBLU sasaran strategis dan program indikator kinerja utama terdapat perubahan sehingga ada beberapa indikator kinerja utama yang berbeda untuk kurun waktu 5 tahun 2021-2025 yang **semula** sebagai berikut :

**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BPFK JAKARTA TAHUN 2021-2025**

No	Sasaran Strategis	KPI	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	80	80	92	94
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Jumlah	155	210	210	211	212
		KPI.3	Penambahan ruang lingkup Akreditasi	Jumlah	60	80	80	82	85
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Jumlah	45	56	56	65	75
4	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI.5	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Jumlah	40000	35000	42,000	45,000	50,000
	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	KPI.6	Persentase Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan yang memenuhi persyaratan	%	70	80	80	90	100
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPAFK Jakarta	KPI.7	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	%	75	85	85	95	100
6	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI.8	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	%	100	90	100	100	100
7	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	KPI.9	Pendapatan PNBP	Jumlah	8,5 M	9 M	9 M	9,5 M	10 M
		KPI.10	Realisasi anggaran	%	100	95	95	96	97

Dan untuk perubahan sasaran strategis dan program indikator kinerja utama untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Semula :

Menjadi :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2023	No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
2	a. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI. 2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	85 Ruang Lingkup	2	a. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI. 2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	85 Ruang Lingkup
	b. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPAPeningkatan cakupan jenis pelayanan SPA	KPI. 3	Jumlah ruang lingkup pelayanan	221 Layanan		b. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPAPeningkatan cakupan jenis pelayanan SPA	KPI. 3	Jumlah ruang lingkup pelayanan	221 Layanan
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 4	ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	70%	3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 4	ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	70%
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPAFK Jakarta	KPI. 5	Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator	92%	4	Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	KPI. 5	Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator	95%
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPAFK Jakarta	KPI. 6	Peningkatan kompetensi pada SDM	85%	5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPAFK Jakarta	KPI. 6	Peningkatan kompetensi pada SDM	85%

6	Meningkatnya pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI. 7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	17,3 M	6	Meningkatnya pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI. 7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	17,3 M
7	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI. 8	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	AA	7	Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPAFK secara optimal	KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	1 Layanan
				KPI. 9			Ketepatan waktu pelayanan	80%	
				KPI.10			Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	1 Sistem	
				8	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	KPI.11	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	95%	
						KPI.12	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	97%	
						KPI.13	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU	95%	
9	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI.14	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	AA	9	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI.14	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	AA

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Target kinerja ini menjadi komitmen Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta untuk mencapainya pada tahun 2023.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2023
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
2	a. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI. 2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	85 Ruang Lingkup
	b. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPAPeningkatan cakupan jenis pelayanan SPA	KPI. 3	Jumlah ruang lingkup pelayanan	221 Layanan
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 4	ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	70%
4	Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	KPI. 5	Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator	95%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2023
(1)	(2)	(3)		(4)
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	KPI. 6	Peningkatan kompetensi pada SDM	85%
6	Meningkatnya pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI. 7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	17,3 M
7	Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPFK secara optimal	KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	1 Layanan
		KPI. 9	Ketepatan waktu pelayanan	80%
		KPI.10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	1 Sistem
8	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	KPI.11	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	95%
		KPI.12	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	97%
		KPI.13	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU	95%
9	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI.14	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	AA

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

#### KPI.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kepuasan pelanggan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dari BPAFK Jakarta. Target yang ditetapkan adalah 81.

**Tabel KPI.1  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Taop	81	81

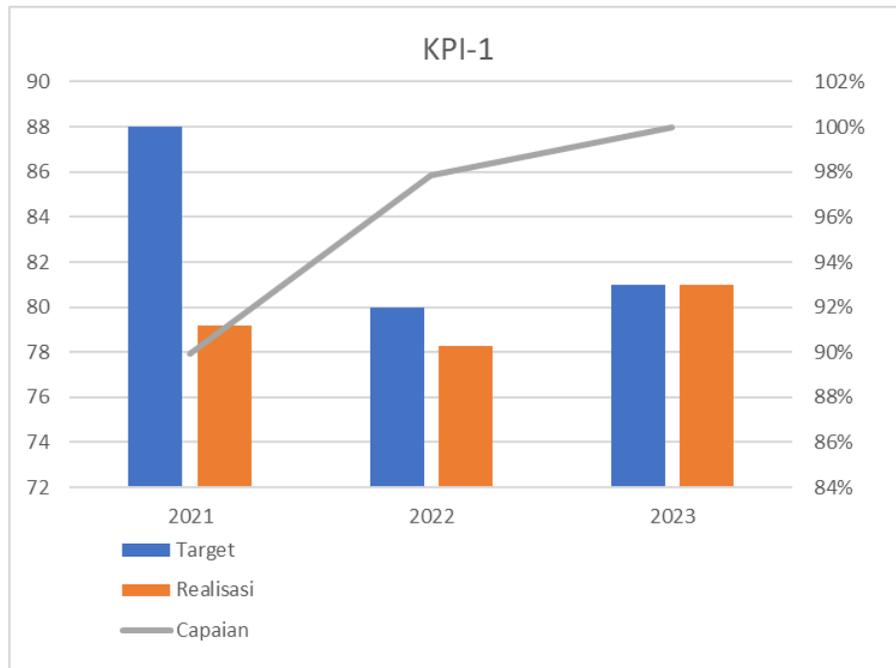
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini :

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan pelanggan 81 dan realisasi 81 atau 100% maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator adalah **Sangat BAIK**.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan	Taop	88	80	81	79,16	78,27	81	89.95%	97.84%	100%

Realisasi kinerja indeks kepuasan pelanggan Tahun 2023 sebesar 81, Tahun 2022 sebesar 78,27 dan Tahun 2021 sebesar 79,16.



**Gambar 1 Indeks Kepuasan Pelanggan**

3. Realisasi indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2022 sebesar 78,27 dan realisasi tahun 2021 sebesar 79,16, sehingga terjadi pencapaian masing-masing sebesar 97,84 % dan 89,95 %.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional Berdasarkan Nilai Interval Konversi IKM pada Permen PAN RB No 14 tahun 2017 tentang indeks kepuasan masyarakat (pelanggan eksternal) yang bisa dibandingkan yaitu 76,61 – 88,30 mendapat nilai mutu pelayanan B.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan  
Analisa capaian kinerja untuk indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal yaitu ;

Kepuasan pelanggan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dari

BPFK Jakarta. Nilai Rata-rata Unsur dari Unsur Pelayanan menunjukkan gambaran hasil penilaian seluruh indikator dalam survey ini.

Dari sembilan indikator tersebut terdapat dua indikator yang dapat dikatakan dalam kategori yang paling baik adalah : Penggunaan aplikasi SIPEKA mempercepat laporan hasil, respon time pengaduan melalui kontak BPFK lebih cepat, sementara indikator yang menurut responden paling tidak baik kondisinya adalah unsur kurangnya jumlah petugas pengujian/kalibrasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan waktu penyelesaian laporan/sertifikat yang masih lama.

Pengukuran kinerja waktu penyelesaian uji profisiensi kalibrasi alkes hasilnya dinilai kurang baik menunjukkan bahwa Responden masih belum cukup puas dengan waktu penyelesaian yang ada walau pada kenyataannya, BPFK Jakarta sudah memberikan waktu penyelesaian selama 30 hari kerja karena penggunaan SIPEKA belum 100%, sebagian laporan masih menggunakan aplikasi SIMPEL.

Alternatif Solusi :

Rencana tindak Lanjut SKM antara lain:

- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kalibrasi BPFK Jakarta (SIPEKA) dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan BPFK Jakarta (SIMPEL).
  - b. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal BPAFK Jakarta
  - c. Pelaksanaan sistem reward & punishment bagi pegawai BPFK Jakarta terhadap kinerja layanan
  - d. Humas untuk menangani pengaduan pelanggan.
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Survey pengambilan data secara langsung atau menggunakan media elektronik dan analisa dilakukan oleh staf seksi Tata Operasional
1. Penggunaan anggaran sesuai Standar Biaya Umum
  2. Alokasi anggaran dalam Dipa sebesar Rp 190.160.000 dan realisasi sebesar Rp 177.578.620,- atau 93,38 %.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kepuasan pelanggan BPFK Jakarta perlu ditunjang oleh penambahan petugas pengujian/kalibrasi, integrasi pelaporan dan monitoring evaluasi pelayanan serta peningkatan aplikasi SIPEKA.

KPI. 2 Jumlah ruang lingkup pelayanan Yang terakreditasi

Jumlah ruang lingkup pelayanan SPA yang terakreditasi adalah akumulasi jenis pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan dan alat ukur serta inspeksi sarana prasarana yang terakreditasi sesuai persyaratan yang diberikan oleh lembaga atau instansi yang berwenang memberikan akreditasi.

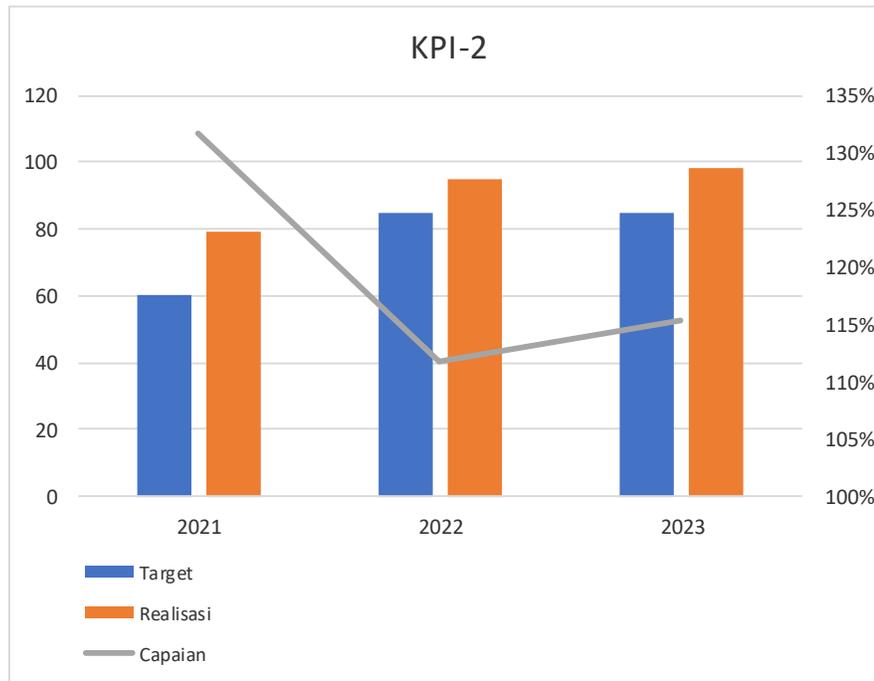
Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 85 ruang lingkup.

**Tabel KPI. 2**  
**Jenis Ruang Lingkup Pelayanan yang terakreditasi**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Taop	85	98

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 85 dan realisasi kinerja sebesar 98 atau (115,29)%, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja penambahan jenis ruang lingkup pelayanan **Sangat Baik**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yg terakreditasi	Taop	60	85	85	79	95	98	131,67%	111,76%	115,29%



3. Realisasi kinerja jenis ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi Tahun 2023 sebesar 98, Tahun 2022 sebesar 95 jenis alat dan Tahun 2021 sebesar 79 jenis alat, sedangkan capaian Tahun 2023 sebesar 131,67 %, Tahun 2022 sebesar 111,76 % dan Tahun 2021 sebesar 115,29 %.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yg terakreditasi	Taop	60	85	85	79	95	98

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 98 dengan target jangka menengah pada rencana strategis tahun 2023 sebesar 85 terdapat peningkatan sebesar 115.29 %.

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)  
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
  - a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja yaitu:
    1. Tersedianya Sumber daya yang kompeten.
    2. Penambahan pelayanan uji produk, uji profisiensi dan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dan alat ukur.
7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
  - a. Mudah mendapatkan akses informasi dokumen standar
  - b. Narasumber dari luar yang professional mudah diakses.
  - c. Kemampuan dari sumber daya pelaksana yang berpengalaman.
  - d. Alokasi dana untuk menunjang kegiatan ini sebesar Rp284.122.000,- realisasi sebesar Rp268.911.210,- atau 94,65 %.
8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 

Terdapat kegiatan penyusunan dan uji coba metode serta pengadaan peralatan alat ukur.

**KPI.3 Jumlah ruang lingkup pelayanan**

Realisasi Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan adalah akumulasi ruang lingkup pelayanan pengujian kalibrasi dan SPA adalah jumlah jenis pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan dan alat ukur serta inspeksi sarana prasarana yang mampu dilayani.

Target yang ditetapkan Tahun 2023 adalah 221 layanan.

**Tabel KPI.3**  
**Jumlah ruang lingkup pelayanan**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.3	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Taop	221	448

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja yang ditetapkan 221 dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 448, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator ini **Sangat Baik**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2020	2021	2023	2021	2022	2023
KPI.3	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Taop	155	210	221	187	269	448	120,65%	128,10%	202,71%

Total realisasi penambahan ruang lingkup pelayanan tahun 2023 adalah 448, tahun 2022 sebesar 269 realisasi dan tahun 2021 ada 155 lingkup pelayanan dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 202,71% dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 128,10%, maka dapat dinyatakan tercapai.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Analisa penyebab keberhasilan capaian kinerja yaitu :

Jadwal survailen/akreditasi yang bersamaan pada tahun 2023 ada 4 sistem mutu SNI 17025:2017; SNI 17043:2010; SNI 17021:2012; SNI 17065:2012 melibatkan Lab Kalibrasi Alat Kesehatan, Lab Kalibrasi Alat Ukur Standar, Penyelenggara Uji Profisiensi, Lab Inspeksi Sarana dan Prasarana dan Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjang oleh kesiapan seluruh personil Laboratorium dengan

personil Tata Operasional dalam menghadapi Survailen/Akreditasi sehingga target kinerja tercapai.

5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

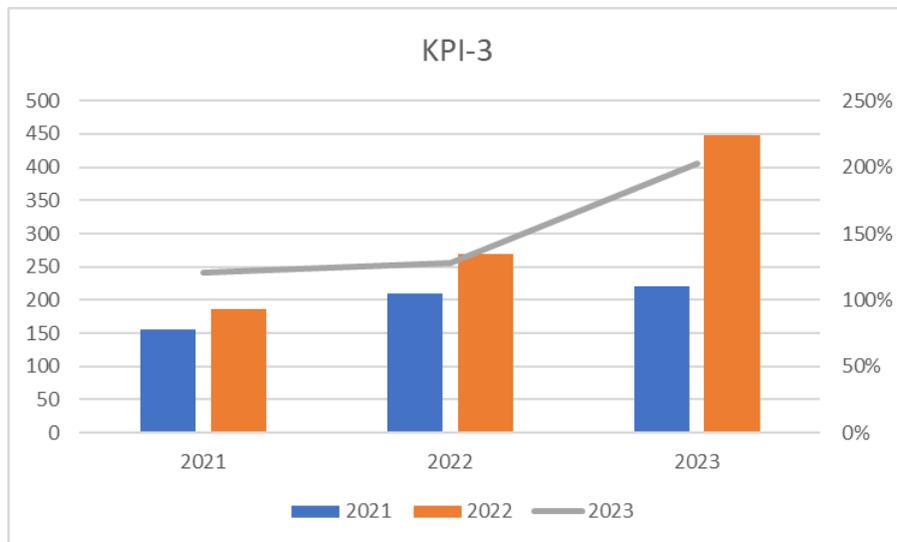
- a. Pelaksanaan kegiatan harus berazaskan kepada kewajaran, transparansi, dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU)
- b. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp259.686.000,- dan realisasi sebesar Rp246.213.000,- atau 94.81%.

6. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kebutuhan untuk Jaminan pelayanan sesuai dengan Permenkes no 54 tahun 2015 dan Standar Nasional Indonesia serta kepercayaan pelanggan pada Lembaga yang terakreditasi.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kebutuhan untuk Jaminan pelayanan sesuai dengan Permenkes no 54 tahun 2015 dan Standar Nasional Indonesia serta kepercayaan pelanggan pada Lembaga yang terakreditasi



KPI. 4 Ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM

Ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM adalah Pemenuhan ketepatan waktu penerbitan sertifikat /laporan (LHU) sesuai standar layanan, Target yang ditetapkan 70%.

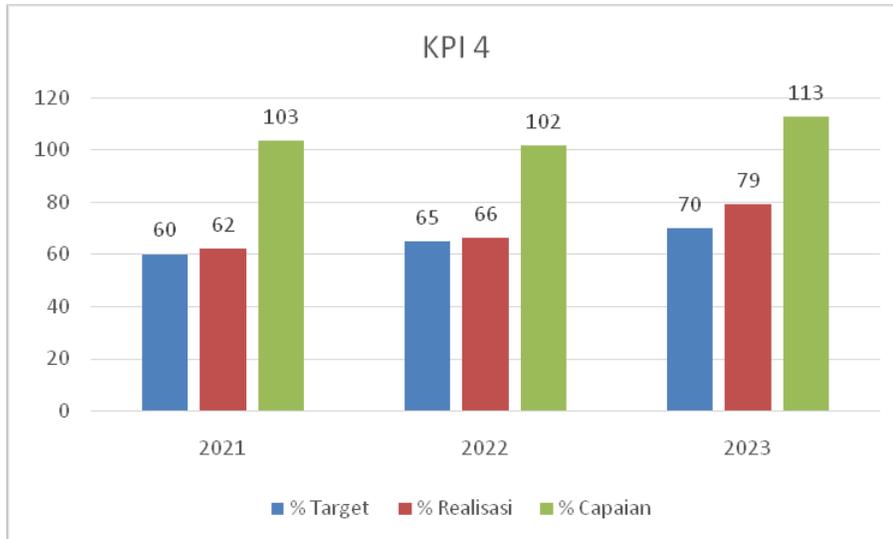
**Tabel KPI.4**  
**Ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.4	Ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM adalah Pemenuhan ketepatan waktu penerbitan sertifikat /laporan (LHU) sesuai standar layanan	Yantek	70%	79%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 70% dan realisasi kinerja sebesar 79% atau (113%) maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Sangat Memuaskan.**
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.4	Ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	Yantek	60%	65%	70%	62%	66%	79%	103%	102%	113%

Capaian indikator kinerja di tahun 2023 sebesar 113 %, tahun 2022 sebesar 102%, maka dinyatakan ada kenaikan kinerja sebesar 11%. Kenaikan ini dikarenakan petugas sudah menginput pelaporan melalui aplikasi SIPEKA dan penerbitan sertifikat sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Pelayanan).



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 79% (98%) dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 80%

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan ataupun Standar Nasional yang bisa dibandingkan, hanya menganalisa data penerbitan sertifikat sesuai standar pelayanan minimal BPFK Jakarta.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

1. Penambahan sumber daya manusia dan kapasitasnya
2. Pembuatan aplikasi SIPEKA untuk evaluasi laporan kalibrasi alkes yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEL untuk penerbitan sertifikat
3. Meningkatnya permintaan pelayanan uji produk alat kesehatan produksi dalam negeri.
4. Meningkatnya jumlah kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi serta inspeksi.
5. Peningkatan mutu layanan dan lingkup akreditasi BPAFK Jakarta.

6. Terlaksananya perjanjian Kerjasama (MoU) pelayanan dengan beberapa RS Vertikal, RS Pemerintah Daerah dan RS Swasta.
  7. Adanya program supervisi atau pemantauan pelaksanaan dan *feedback* terhadap pelayanan BPFK Jakarta
- b. Analisa penyebab kendala
1. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMPEL, dikarenakan belum tersedianya beberapa menu penunjang untuk monitoring bagi petugas kalibrasi alkes.
  2. Gangguan jaringan internet saat input laporan kalibrasi difasyankes
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Dengan adanya integrasi aplikasi SIPEKA petugas laboratorium alkes dapat input langsung bersamaan kalibrasi di fasyankes dengan SIMPEL maka substansi Pelayanan Teknis dapat melakukan koordinasi pelayanan dan melakukan verifikasi dan validasi penerbitan sertifikat .
- 7 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
- Masih ada Instalasi laboratorium AUS , PRUK, Dosimetri, Uji Produk dan Sarana Prasarana yang membuat Laporan Hasil pada SIMPEL masih dilakukan secara manual (dengan mengupload exel dan pdf) sehingga masih memungkinkan terjadinya beberapa kesalahan Laporan Hasil yang diterbitkan secara elektronik sehingga diperlukan pengembangan aplikasi pembuatan laporan hasil Pengujian/Kalibrasi bagi Instalasi tersebut

#### KPI.5 Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator

Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator adalah kelayakan alat ukur yang dapat dinilai antara lain melalui rekalisasi di Institusi kalibrasi yang terakreditasi/tertelusur, yang memenuhi batas keberterimaan. Alat ukur dan kalibrator yang belum dapat di rekalisasi maka dilakukan penjaminan mutu alat tersebut melalui pengecekan antara, uji banding, uji profisiensi dan interkomparasi

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 95%.

**Tabel KPI.5**  
**Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator**

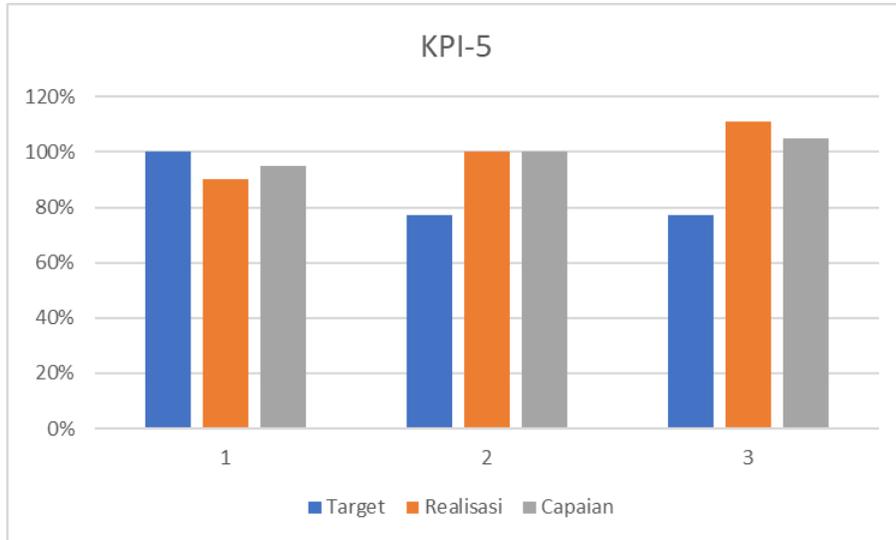
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.5	Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator	Taop	95%	100%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 95% dengan realisasi tahun ini sebesar 100% tingkat keandalan alat, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indicator tercapai.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.5	Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator	Taop	100%	90%	95%	77%	100%	100%	77%	111%	105%

Realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 100 alat, Tahun 2022 sebesar 100% alat dan Tahun 2021 sebesar 77%, sedangkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 105%, Tahun 2022 sebesar 111% dan Tahun 2021 sebesar 77%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)  
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.



**Gambar 2 Jumlah Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal**

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab kegagalan :

- a. Alat Ukur masih dipakai pelayanan di Fasyankes
- b. Keterbatasan penyedia kalibrasi alat ukur antara lain Layanan SNSU BSN dan Lab Kalibrasi alat standar dimana rentang ukur yang diperlukan BPAFK Jakarta belum tersedia.
- c. Terbatasnya anggaran kalibrasi.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Peningkatan kemampuan Laboratorium Kalibrasi AUS BPFK Jakarta sesuai keperluan rentang ukur alat ukur alat kesehatan.
2. Seleksi Pemilihan penyedia kalibrasi pada instansi pemerintah misal BATAN, SNSU BSN, Dit.Metrologi
3. Peralatan yang tidak dapat dilakukan recalibrasi yang tidak ada penyedia, maka dilakukan verifikasi terhadap alat sejenis.
4. Anggaran Pemeliharaan Alat Pengujain Kalibrasi sebesar Rp1.477.776.000 telah direalisasi sebesar Rp1.391.619.452 (94.17%)

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Kegiatan yang menunjang : Akreditasi, Audit Internal

2. Diperlukan koordinasi antara jadwal recalibrasi dengan jadwal pelayanan BPFK Jakarta

KPI.6 Pertambahan jumlah personil yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan sertifikat kelulusan sesuai kompetensinya.

Pertambahan jumlah personil yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan sertifikat kelulusan sesuai kompetensinya.

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 85%

**Tabel KPI.6**

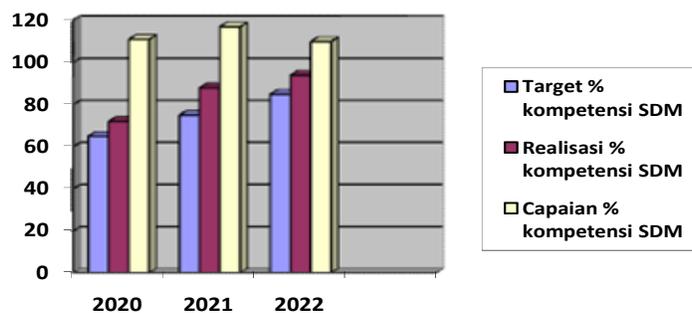
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.6	Pertambahan jumlah personil yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan sertifikat kelulusan sesuai kompetensinya	Bimtek	85%	96%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja tahun ini sebesar 85% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 96%, maka dinyatakan bahwa capaian berdasarkan indicator ini **Memuaskan.**
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.6	Pertambahan jumlah personil yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan sertifikat kelulusan sesuai kompetensinya	Bimtek	75%	85%	85%	88%	94%	96%	117%	110%	113%

Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian kinerja maka terlihat realisasi tahun 2023 sebesar 96% meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 94%. Adapun capaian tahun 2023 sebesar 113% terlihat meningkat dibanding capaian 2022 sebesar 110%. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya jumlah pegawai BPFK Jakarta yang mengikuti sertifikasi dan pemenuhan kompetensi SDM pada tahun 2021 dan 2022 juga bertambahnya target tahun 2021 semula sebesar 75% menjadi 85% pada tahun 2022

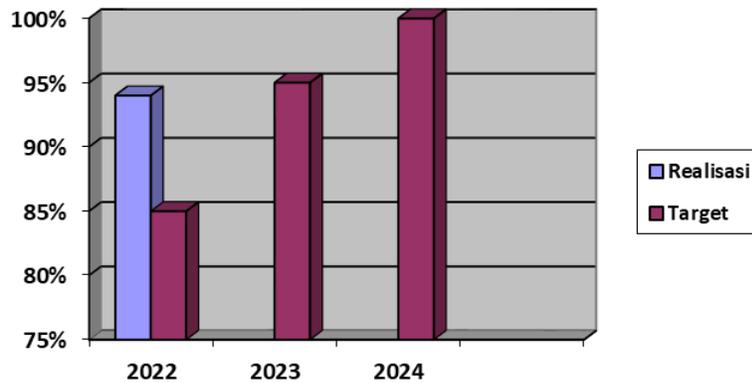
Adapun realisasi indicator kinerja dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka dapat dinyatakan ada perkembangan kenaikan kinerja yang signifikan rata-rata sebesar 6%.



Grafik Persentase pemenuhan kompetensi SDM

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah capaian tahun ini mencapai 94%, telah memenuhi target jangka menengah



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada) Untuk mendukung misi pemerintah tahun 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas Indonesia dan Misi Kemenkes yaitu Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan serta sesuai dengan UU ASN No. 5 Tahun 2014, merujuk pada PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Setiap pegawai Negeri Sipil minimal 20 JPL/tahun wajib mendapatkan pendidikan/pelatihan dalam setiap PNS di BPFK Jakarta dan harus mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Maka tahun 2022 realisasi kinerja 94% belum mencapai target secara nasional yaitu 100%.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
  - a. Analisa penyebab keberhasilan :
    1. Melakukan perencanaan pelatihan berbasis kompetensi dan Training Need Analysis sesuai kebutuhan organisasi
    2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan kompetensi telah sesuai dengan programnya
    3. Ketersediaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan  
Tercapainya SDM yang kompeten dibidangnya.
    4. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Internal Pengujian Kalibrasi Alkes
  - b. Adapun solusi peningkatan pencapaian kinerja adalah
    1. Melakukan kegiatan pelatihan yang terakreditasi melalui pengampuan Balai Pelatihan Kesehatan
    2. Membangun jaringan kemitraan dengan stakeholder penyelenggara pelatihan dan uji kompetensi.

3. Penunjukan BPFK Jakarta sebagai Tempat Uji Kompetensi

c. Analisa kendala :

1. Padatnya pelayanan dan kegiatan Laboratorium dan unit kerja untuk mengikuti program pelatihan dan uji kompetensi
2. Kurangnya monitoring dari unit kerja dan kepala instalasi serta substansi kemitraan dan Bimtek terhadap staf yang belum kompetensi

Terdapat 34 orang yang mengikuti sertifikasi tahun 2023 dengan hasil 32 orang lulus dan 2 orang belum lulus penguji berkualifikasi pesawat sinar x sebagai berikut

Sertifikasi Tenaga Pelatih Kesehatan	2 orang
Sertifikasi Audit Internal Lab.SNI ISO/IEC 17025:2017	4 orang
Sertifikasi Pengendali Pelatihan	1 orang
Sertifikasi Teknisi Elektromedik Skema Kalibrasi Alkes Teknologi Sederhana	21 orang
Pelatihan & Sertifikasi Penguji Berkualifikasi	3 orang
Sertifikasi TOT, TNA dan Pembuatan Modul Pelatihan	3 orang

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

- a. Efisiensi biaya pelatihan dilakukan dengan mengubah pelatihan menjadi inhouse training dan metode daring juga luring ( menghilangkan biaya perjalanan dinas) serta menambah jumlah kuota peserta pelatihan tanpa harus menambah biaya pelatihan.
- b. Alokasi anggaran dalam DIPA 2022 sebesar Rp1.431.098.000,- terealisasi sebesar Rp1.270.097.461,- atau sebesar 88,75%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a. Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh Program / kegiatan yaitu :
  1. Membangun Jejaring Kemitraan dengan BRIN (BATAN, BSN / Laboratorium SNSU), Instansi Pendidikan, Bapelkes, PT Sucofindo antara lain melalui kerjasama dengan Diklat BSN
  2. Penunjukan BPFK Jakarta sebagai tempat uji Kompetensi Teknisi Elektromedik Skema Kalibrasi Alkes

3. Melakukan Koordinasi antara substansi kemitraan dan bimtek dengan unit kerja lainnya dalam merencanakan pelatihan.
  4. Melakukan pelatihan inhouse training teknis dan mutu layanan sebanyak 14 kegiatan
  5. Menerapkan program pelatihan sesuai standar SNI 17025 , SNI 17020 dan 17043 serta SNI 17065
- b. Kegagalan rendahnya pencapaian realisasi anggaran yaitu :
1. Terbatasnya Penyelenggara pelatihan dan sertifikasi dari eksternal.
  2. Berkurangnya Volume penyenggaraan dari BATAN karena Perubahan struktur organisasi di BATAN menjadi bagian dari BRIN
  3. Belum adaptasi atas Perubahan Skema Sertifikasi Penguji Berkualifikasi dari BAPETEN karena personel UPFPFK Palembang belum memenuhi jumlah fortopolio yang ditentukan.
- c. Rencana Tindak lanjut adalah melakukan :
1. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan serta kerjasama dengan organisasi profesi instansi lain misal IKATEMI, BRIN dan BAPETEN serta LSP Kesehatan /BNSP
  2. Menjadi Penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi
  3. Menyusun kurikulum dan Modul Pelatihan kalibrasi Medium Risk
  4. Meningkatkan koordinasi dan kesiapan personel dalam melakukan kompetensi/sertifikasi.
  5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi dan lembaga sertifikasi profesi

#### KPI.7 Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan

Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan adalah Jumlah pendapatan melalui produktifitas pelayanan

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 19,5 M.

**Tabel KPI.7**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI. 7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	Adum	19.5 M	25.8 M

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 19,5 M dan realisasi kinerja sebesar 25.8 M, maka dinyatakan bahwa pencapaian berdasarkan indicator kinerja itu **Sangat Memuaskan.**
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI. 7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas	Adum	-	-	19,5 M	-	-	25,8 M	-	-	132%

Pada indicator ini realisasi kinerja tidak dapat di bandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 karena indicator kinerja tahun sebelumnya tidak tersedia. Adapun realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar Rp Rp25.803.012.028,- atau 132% sangat memuaskan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi  
Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah capaian tahun ini 2024 akan lebih meningkat.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)  
Belum ada target secara nasional yang ditargetkan oleh regulator dalam hal ini Ditjen Pelayanan Kesehatan. Namun berdasarkan Permenkes 54 tahun 2015 , BPFK kelas A / Jakarta ditunjuk sebagai institusi pengujian

Alat Kesehatan penyelenggaraan uji profisiensi pengujian dan kalibrasi Alkes dan melakukan pendampingan, pelatihan, advokasi, serta penelitian/bimbingan teknis.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Analisis penyebab keberhasilan melewati angka 100% pada indikator ini yaitu :

BPFK Jakarta melakukan kegiatan kemitraan dan jejaring kerja serta bimtek/pelatihan pada IPFK pemerintah dan swasta sesuai pemenuhan Permenkes No 54 tahun 2015 . IPFK tersebut telah memenuhi persyaratan Komite Akreditasi Nasional dan regulasi untuk kewajiban Institusi Penguji / Laboratorium kalibrasi untuk mengikuti Uji Profisiensi Kalibrasi Alkes. Program kemitran dan jejaringkerja secara umum berjalan sesuai perencanaan, promosi terhadap penawaran kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek Uji produk, Pelatihan IPFK dan Workshop serta Webinar), Efektifivitas pemanfaatan teknologi dalam kegiatan Webinar , menyiapkan tema kegiatan webinar yang tepat sasaran.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Melakukan efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan daring/online serta meningkatkan kerjasama antara institusi. Kolaborasi dan koordinasi antara kegiatan Substansi Kemitraan dan Bimbingan Teknis dengan Substansi Tata Operasional serta personel teknis di Instalasi/Laboratorium BPFK Jakarta selama pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada institusi penguji

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tahun 2023 BPFK melakukan program yaitu :

- a. Kemitraan , jejaring kerja dan promosi serta pameran .
- b. Kegiatan Pengampuan di Unit Kalibrasi Mandiri 3 RS Vertikal
- c. kegiatan pelatihan di IPFK Pemerintah dan swasta serta bimtek kalibrasi alat ukur .
- d. Melalukan Sosialiasi layanan melalui webinar dan radio kemenkes serta medsos BPAFK Jakarta.

- e. Menyelenggarakan uji profesi terakreditasi PUP 020-ID
- f. BPFK Jakarta telah ditunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi oleh LSP Kesehatan serta memiliki Pengampu Bapelkes Cikarang untuk pelatihan terakreditasi dan mampu melaksanakan uji kompetensi teknisi melalui uji kompetensi internal dan eksternal bersama organisasi profesi antara lain AFISMI dan IKATEMI

**KPI.8 Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional**

Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional adalah Kerja sama dengan Institusi Luar Negeri di bidang kesehatan atau lainnya terkait peningkatan layanan unggulan

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 1 layanan

**Tabel KPI.8**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	Bimtek	1	1

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja tahun ini sebesar 1 dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 1, maka dinyatakan bahwa capaian berdasarkan indicator ini **Memuaskan.**
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	Bimtek	-	-	1	-	-	1	-	-	100%

Realisasi indikator ini belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja realisasi tahun 2022 karena baru pertama kali dibuat target untuk tahun 2023. Adapun capaian tahun 2023 sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena sejak tahun 2023 mulainya BPFK Jakarta menjalin kerjasama dengan lembaga luar negeri untuk melaksanakan kegiatan bersama.

3. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
  - Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :
    - a. Analisa penyebab keberhasilan :
      1. Melakukan perencanaan pelayanan sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan kebutuhan menjalin kerjasama internasional
      2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan telah sesuai dengan programnya
      3. Ketersediaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan.
    - b. Adapun solusi peningkatan pencapaian kinerja adalah
      1. Melakukan kegiatan kolaborasi dengan lembaga internasional yang sesuai dengan tupoksi BPFK.
      2. Membangun jaringan kemitraan dengan stakeholder penyelenggara pelayanan sejenis.
  - Analisa kendala :
    1. Padatnya pelayanan dan kegiatan Laboratorium dan unit kerja BPFK Jakarta untuk menyertakan personil terkait
    2. Kurangnya ketrampilan berbahasa inggris untuk memperlancar komunikasi pelayanan internasional.

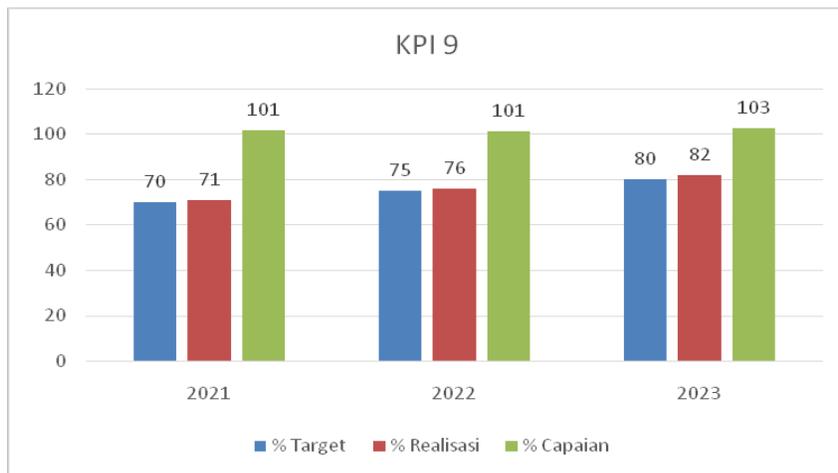
#### KPI.9 Ketepatan Waktu Pelayanan

Ketepatan waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan. Target yang ditetapkan 80 %.

**Tabel KPI.9**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.9	Ketepatan Waktu Pelayanan	Yantek	80%	82%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 80% dan realisasi kinerja sebesar 82% (138%) maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Memuaskan**.



2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.9	Ketepatan Waktu Pelayanan	Yantek	70%	75%	80%	71%	76%	82%	101%	101%	103%

Capaian indikator kinerja di tahun 2023 sebesar 103%, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 101%, maka dinyatakan ada kenaikan kinerja sebesar 2%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 82% (103%) dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 85%

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan ataupun Standar Nasional yang bisa dibandingkan, hanya menganalisa data penerbitan sertifikat sesuai standar pelayanan minimal BPFK Jakarta.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

- Keberhasilan ini karena pengajuan layanan oleh pelanggan sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPATEN yang terintegrasi dengan SIMPEL (Sistem Pelayanan) dan pengembangan aplikasi SIMPEL untuk monitoring layanan.
- Melakukan koordinasi dan Evaluasi serta untuk pelaksanaan pelayanan
- Meningkatkan kerjasama / MoU untuk pelaksanaan pelayanan
- Melakukan monitoring perminggu dan perbulan dan evaluasi
- Adanya kegiatan sosialisasi pelayanan BPFK pada webinar dan pameran serta promosi
- Peningkatan program supervisi atau pemantauan pelaksanaan dan *feedback* terhadap pelayanan BPFK Jakarta

- b. Analisa penyebab kendala

1. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIPATEN oleh pelanggan
2. Perlu peningkatan beberapa menu penunjang untuk monitoring
3. Perlu koordinasi dan kolaborasi untuk pemenuhan ASPAK di Kemenkes dan Balis di BAPETEN

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan adanya aplikasi SIPATEN dan SIMPEL maka pelanggan dan substansi Pelayanan Teknis dapat melakukan koordinasi secara on line

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pembuatan Laporan Hasil pada SIMPEL masih dilakukan secara manual (dengan mengupload exel dan pdf) sehingga masih memungkinkan terjadinya beberapa kesalahan Laporan Hasil yang diterbitkan secara elektronik sehingga diperlukan pengembangan aplikasi pembuatan laporan hasil Pengujian/Kalibrasi

KPI.10 Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital

Integrasi Sistem Informasi Layanan Berbasis Digital adalah sistem informasi yang mencakup modul layanan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 1 Sistem.

**Tabel KPI.10**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	Adum	1 Sistem	1 Sistem

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 1 Sistem dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 1 Sistem, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Sangat Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir  
Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan karena tahun 2022 dan 2021 tidak ada indikator tersebut.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan jangka menengah karena tahun 2022 dan 2021 tidak ada indikator tersebut

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan  
Analisa penyebab keberhasilan :
  1. Adanya koordinasi yang baik dari semua pihak terkait
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
  1. Alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp 446.000.000,- terealisasi sebesar Rp442.250.000,- atau 99,16%.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  
Faktor penunjang keberhasilan :
  1. Telah di terapkannya sistem informasi pelayanan pada Aplikasi SIMPEL.
  2. Melakukan koordinasi antara BPFK dengan sarpelkes

**KPI.11 Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU**

Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas balai selama 1 (satu) periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan yang berasal dari APBN/RM tidak diperhitungkan.

Target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 95%.

**Tabel KPI.11**  
Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.11	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	Adum	95%	132%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 95% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 132%, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **sangat memuaskan**.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.11	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	Adum	8,5 M	9 M	19,5 M	10,1 M	15,1 M	25,8M

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Indikator 2023 tidak dapat dibandingkan dengan jangka menengah karena tahun 2022 dan 2021 tidak ada indikator tersebut, tetapi tahun tahun 2022 dan 2021 termasuk pada indikator presentase pendapatan PNBPN, dimana dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan pendapatan yang sangat signifikan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 358/KMK.06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Jika dibandingkan dengan Standar Nasional tidak ada.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan :

Adanya koordinasi yang baik dari semua pihak terkait

Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Adanya tim PNBPN yang bertugas diantaranya melakukan followup kepada pelanggan/customer dalam hal proses atau persyaratan pembayaran.

Alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp19.126.205.000,- terealisasi sebesar Rp17.796.319.704,- atau 93,05%.

Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor kegagalan :

Kegiatan yang dibiayai dengan sumber BLU tidak semuanya dapat dilaksanakan, karena kegiatan dilaksanakan akhir tahun sehingga realisasi tidak maksimal.

**KPI.12 Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni**

Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni adalah Realisasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni.

Target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 97%.

**Tabel KPI.12**

Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.12	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	Adum	97%	99,38%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 97% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 99,38%, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **sangat memuaskan.**

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.12	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	Adum	100%	95%	97%	92,99%	92,42%	99,38%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Pada Capaian Indikator 2023 realisasi anggaran sebesar 99,38% dan jika dibandingkan dengan jangka menengah capaian meningkat.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Persentase realisasi anggaran bersumber rupiah murni tidak bias dibandingkan dengan standar nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan :

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran, melakukan update rencana penarikan dana dan kegiatan serta melakukan koordinasi dengan penanggungjawab (PIC) kegiatan.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran rupiah murni dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp55,729,612,000,- dan terealisasi sebesar Rp55,382,597,508,- atau 99,38%.

Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor keberhasilan :

Kegiatan yang dibiayai dengan sumber Rupiah Murni hampir seluruhnya dapat di laksanakan.

#### KPI.13 Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU

Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU Realisasi anggaran yang bersumber dari Rupiah BLU.

Target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 95%.

**Tabel KPI.13**  
 Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.13	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni BLU	Adum	95%	94,09%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.  
 Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 95% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 94,09%, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **sangat memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.13	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni BLU	Adum	-	-	95%	-	-	93,05%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi  
 Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan jangka menengah karena tahun 2022 dan 2021 tidak ada indikator tersebut
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan  
 Analisa penyebab kegagalan :  
 Terdapat beberapa kegiatan dalam DIPA yang bersumber dari rupiah BLU tidak dapat terealisasi seluruhnya karena pada pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan dipenghujung tahun dan karena ada kegiatan yang

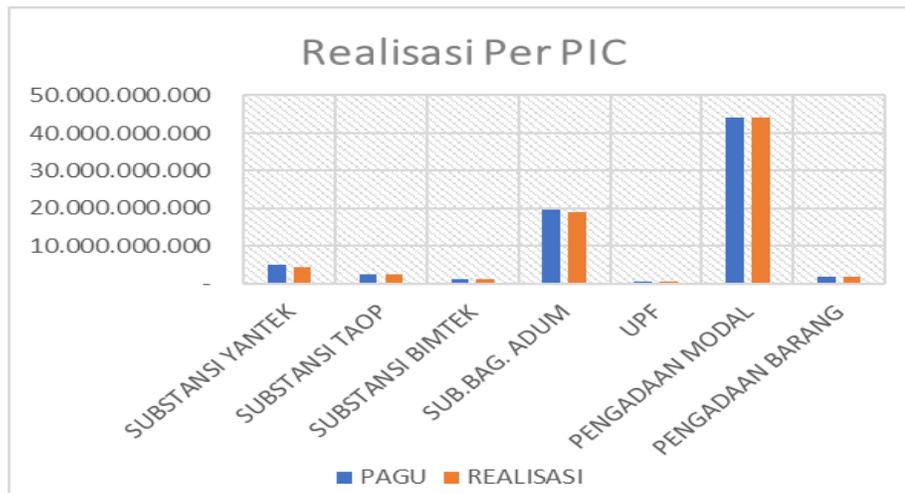
berisikan dengan kegiatan antar PIC atau ada undangan dari pihak eksternal satker. Sehingga realisasi yang bersumber dari BLU tidak mencapai target.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran kegiatan yang bersumber rupiah BLU dalam Dipa tahun 2023 sebesar Rp19,126,205,000,- terealisasi sebesar Rp17.796,319,704,- atau 93,05%.

Adapun alokasi pagu dan realisasi per sub bagian/Koordinator Substansi yang ada di BPFK yaitu :

PEMBAGIAN PER PIC	PAGU	REALISASI	%
SUBSTANSI YANTEK	4.939.894.000	4.532.075.154	91,74
SUBSTANSI TAOP	2.620.826.000	2.345.228.223	89,48
SUBSTANSI BIMTEK	1.321.011.000	1.309.299.916	99,11
SUB.BAG. ADUM	19.526.131.000	18.986.448.007	97,24
UPF	487.210.000	432.091.546	88,69
PENGADAAN MODAL	44.165.276.000	44.057.902.764	99,76
PENGADAAN BARANG	1.795.469.000	1.715.315.421	95,54
<b>Jumlah</b>	<b>74.855.817.000</b>	<b>73.378.361.031</b>	<b>98,03</b>



KPI.14 Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Capaian Akuntabilitas kinerja yang memenuhi kriteria karakteristik/Kualitatif berdasarkan regulasi yang berlaku, dan Capaian Kinerja Satker dalam 1 Tahun anggaran.

Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah AA.

**Tabel KPI.14**  
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2023	2023
KPI.14	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Adum	AA	0,75%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini adalah AA dan realisasi kinerja tahun ini belum ada nilai, karena Penilaian kinerja dilakukan setelah tahun berakhir.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KPI.14	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Adum	-	-	AA	-	-	0,75	-	-	0,75

Pada indicator kinerja ini tidak dapat dibandingkan karena tahun 2022, tahun 2021 indikator kinerja tersebut tidak tersedia.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi  
Indikator kinerja tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah karena pada tahun 2022 dan tahun 2021 indikator kinerja tidak tersedia.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)  
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
  - Analisa penyebab penurunan capaian target :
    1. Perubahan metode penilaian SAKIP semula mengacu pada Peraturan Menteri PAN/RB No.20 Tahun 2013 di rubah mengacu pada Peraturan Menteri PAN/RB No. 12 Tahun 2015.
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
  - Pembahasan dan Penyusunan LAKIP dilakukan melalui pertemuan atau rapat yang melibatkan penanggungjawab/PIC pelaksana kegiatan, dan pelaksanaan ini tidak ada sumber danapeserta aktif dan penunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IKU/KPI.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelatihan dan pendidikan atau Bimtek terkait penyusunan kinerja satker yang diselenggarakan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2023. Laporan LAKIP Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja pertama setelah BPFK Jakarta ditetapkan sebagai satker Pengelola Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) pada bulan Januari 2023, tentunya ada beberapa indikator kinerja yang tahun sebelumnya tidak ada.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2023 secara umum **berhasil** mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Pencapaian pada tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi program yang mendukung terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, dengan melakukan inovasi diharapkan pencapaian indikator kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yang ada pada Renstra Kemkes 2025-2029 dapat tercapai.

Selain melakukan inovasi, yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mengoptimalkan sistem informasi yang saling terintegrasi baik di internal maupun eksternal Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, diharapkan dengan adanya Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai target kinerja.

Lampiran – lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subadri, ST.M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Azhar Jaya, SKM, MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

**dr. Azhar Jaya, SKM, MARS.**  
NIP 197106262000031002

**Subadri, ST.M.Si.**  
NIP 197611122005011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**UNIT KERJA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2023
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
2	a. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi.	KPI. 2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	85 Ruang Lingkup
	b. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA	KPI. 3	Jumlah ruang lingkup pelayanan	221 Layanan
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 4	ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	70%
4	Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	KPI. 5	Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator	92 %
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	KPI. 6	Peningkatan kompetensi pada SDM	85 %
6	Meningkatnya pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI. 7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	17,3 M
7	Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPFK secara optimal	KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	1 Layanan
		KPI. 9	Ketepatan waktu pelayanan	80%
		KPI.10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	1 Sistem
8	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	KPI.11	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	95%
		KPI.12	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	97%
		KPI.13	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU	95%
9	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI.14	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	AA

**Program**

1. Program Pelayanan & JKN
  2. Program Dukungan Manajemen
- Total

**Anggaran**

Rp11.154.755.000,-  
 Rp17.670.429.000,-  
 Rp28.825.184.000,-

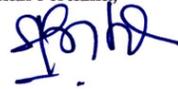
Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



**dr. Azhar Jaya, SKM, MARS**  
NIP 197106262000031002

Pihak Pertama,



**Subadri, ST.M.Si.**  
NIP 197611122005011003

## 2. Laporan realisasi anggaran

### LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian: 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi: 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

Satuan Kerja : 552687 BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

Hal 1 dari 12

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>74,855,817,000</b>	<b>0</b>	<b>27,266,755,207</b>	<b>46,111,606,356</b>	<b>73,378,361,563</b>	<b>98.03 %</b>	<b>1,477,455,437</b>
DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	56,411,572,000	0	11,962,781,204	43,303,965,515	55,266,746,719	97.97 %	1,144,825,281
DG.6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	56,411,572,000	0	11,962,781,204	43,303,965,515	55,266,746,719	97.97 %	1,144,825,281
BUB Penyidikan dan Pengujian Peralatan	4,943,236,000	0	653,395,918	3,711,544,209	4,364,940,127	88.30 %	578,295,873
BUB.001 Layanan Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi (LR)	4,943,236,000	0	653,395,918	3,711,544,209	4,364,940,127	88.30 %	578,295,873
052 Layanan Pengujian Alat dan Proteksi Radiasi - BLU	4,943,236,000	0	653,395,918	3,711,544,209	4,364,940,127	88.30 %	578,295,873
052.0A Kegiatan Pelayanan Pengujian Kalibrasi dan Inspeksi di Fasyankes DTPK/DBK(Daerah Bencana (Seksi Yantek)	6,480,000	0	0	6,480,000	6,480,000	100.00 %	0
525115 Belanja Perjalanan	6,480,000	0	0	6,480,000	6,480,000	100.00 %	0
052.0B Biaya Layanan Pengujian / Kalibrasi dan Proteksi Radiasi, serta Kegiatan CPAKB	4,778,698,000	0	599,530,238	3,626,427,569	4,225,957,807	88.43 %	552,740,193
525115 Belanja Perjalanan	4,758,698,000	0	599,530,238	3,606,435,669	4,205,965,907	88.38 %	552,732,093
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	20,000,000	0	0	19,991,900	19,991,900	99.96 %	8,100
052.0C Biaya Pemeliharaan Alat Uji Kalibrasi	158,058,000	0	53,865,680	78,636,640	132,502,320	83.83 %	25,555,680
525114 Belanja Pemeliharaan	103,648,000	0	35,444,000	68,203,900	103,647,900	100.00 %	100
525115 Belanja Perjalanan	54,410,000	0	18,421,680	10,432,740	28,854,420	53.03 %	25,555,580
CAB Sarana Bidang Kesehatan	7,289,216,000	0	5,072,255,958	2,158,813,150	7,229,069,108	99.17 %	60,146,892
CAB.003 Obat-obatan dan BMHP (LR)	1,418,913,000	0	801,189,900	588,183,560	1,389,373,460	97.92 %	29,539,540
053 Pengadaan Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Reguler - PNB	1,418,913,000	0	801,189,900	588,183,560	1,389,373,460	97.92 %	29,539,540
053.0A Pengadaan TLD Badge	543,573,000	0	317,152,200	197,491,310	514,643,510	94.68 %	28,929,490
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	543,573,000	0	317,152,200	197,491,310	514,643,510	94.68 %	28,929,490
053.0B Pengadaan TLD Badge (Tambahan)	875,340,000	0	484,037,700	390,692,250	874,729,950	99.93 %	610,050
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	875,340,000	0	484,037,700	390,692,250	874,729,950	99.93 %	610,050
CAB.006 Alat Kalibrasi (LR)	5,870,303,000	0	4,271,066,058	1,568,629,590	5,839,695,648	99.48 %	30,607,352
051 Pengadaan Alat Kalibrasi	5,870,303,000	0	4,271,066,058	1,568,629,590	5,839,695,648	99.48 %	30,607,352
051.0A Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi	868,898,000	0	868,895,454	0	868,895,454	100.00 %	2,546
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	868,898,000	0	868,895,454	0	868,895,454	100.00 %	2,546

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

051.0B Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi (Revisi internal)	976,929,000	0	622,422,264	354,499,590	976,921,854	100.00 %	7,146
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	976,929,000	0	622,422,264	354,499,590	976,921,854	100.00 %	7,146
051.0C Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi (Penambahan)	3,649,207,000	0	2,779,748,340	847,750,000	3,627,498,340	99.41 %	21,708,660
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3,649,207,000	0	2,779,748,340	847,750,000	3,627,498,340	99.41 %	21,708,660
051.0D Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi (pergeseran)	375,269,000	0	0	366,380,000	366,380,000	97.63 %	8,889,000

537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	375,269,000	0	0	366,380,000	366,380,000	97.63 %	8,889,000
<b>CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>		<b>446,000,000</b>	<b>0</b>	<b>197,000,000</b>	<b>245,250,000</b>	<b>442,250,000</b>	<b>99.16 %</b>	<b>3,750,000</b>
CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (LR)	446,000,000	0	197,000,000	245,250,000	442,250,000	99.16 %	3,750,000
<b>052 Biaya Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi - BLU</b>		<b>446,000,000</b>	<b>0</b>	<b>197,000,000</b>	<b>245,250,000</b>	<b>442,250,000</b>	<b>99.16 %</b>	<b>3,750,000</b>
052.0A	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan	446,000,000	0	197,000,000	245,250,000	442,250,000	99.16 %	3,750,000
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	446,000,000	0	197,000,000	245,250,000	442,250,000	99.16 %	3,750,000
<b>CBV Prasarana Bidang Kesehatan</b>		<b>2,550,718,000</b>	<b>0</b>	<b>1,895,131,567</b>	<b>619,144,961</b>	<b>2,514,276,528</b>	<b>98.57 %</b>	<b>36,441,472</b>
CBV.002	Renovasi Gedung Layanan - LR	2,550,718,000	0	1,895,131,567	619,144,961	2,514,276,528	98.57 %	36,441,472
<b>051 Renovasi Gedung Layanan</b>		<b>2,550,718,000</b>	<b>0</b>	<b>1,895,131,567</b>	<b>619,144,961</b>	<b>2,514,276,528</b>	<b>98.57 %</b>	<b>36,441,472</b>
051.0A	Pengadaan Renovasi Gedung Kantor BPFK Jakarta	2,394,475,000	0	1,891,628,523	502,837,961	2,394,466,484	100.00 %	8,516
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,394,475,000	0	1,891,628,523	502,837,961	2,394,466,484	100.00 %	8,516
051.0B	Biaya Jasa Konsultansi	156,243,000	0	3,503,044	116,307,000	119,810,044	76.68 %	36,432,956
525112	Belanja Barang	21,243,000	0	0	0	0	0.00 %	21,243,000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	135,000,000	0	3,503,044	116,307,000	119,810,044	88.75 %	15,189,956
<b>CCB OM Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>234,000,000</b>	<b>0</b>	<b>118,880,000</b>	<b>115,000,000</b>	<b>233,880,000</b>	<b>99.95 %</b>	<b>120,000</b>
CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	234,000,000	0	118,880,000	115,000,000	233,880,000	99.95 %	120,000
<b>051 Operasional dan pemeliharaan UPT BLU</b>		<b>234,000,000</b>	<b>0</b>	<b>118,880,000</b>	<b>115,000,000</b>	<b>233,880,000</b>	<b>99.95 %</b>	<b>120,000</b>
051.0A	Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Roda 4	69,000,000	0	68,880,000	0	68,880,000	99.83 %	120,000
525113	Belanja Jasa	69,000,000	0	68,880,000	0	68,880,000	99.83 %	120,000
051.0B	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	165,000,000	0	50,000,000	115,000,000	165,000,000	100.00 %	0
525113	Belanja Jasa	165,000,000	0	50,000,000	115,000,000	165,000,000	100.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,790,914,000	0	2,901,169,270	1,471,454,153	4,372,623,423	91.27 %	418,290,577
EBA.962	Layanan Umum	4,790,914,000	0	2,901,169,270	1,471,454,153	4,372,623,423	91.27 %	418,290,577
<b>052 Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Vertikal - BLU</b>		<b>4,790,914,000</b>	<b>0</b>	<b>2,901,169,270</b>	<b>1,471,454,153</b>	<b>4,372,623,423</b>	<b>91.27 %</b>	<b>418,290,577</b>
052.0A	Honor Pengelola PNBP (Subbag.TU)	62,130,000	0	36,954,000	19,632,000	56,586,000	91.08 %	5,544,000
525112	Belanja Barang	62,130,000	0	36,954,000	19,632,000	56,586,000	91.08 %	5,544,000
052.0B	Honor PPNPN BPFK Jakarta dan UPPPFK Palembang (Subbag.TU)	1,999,531,000	0	1,497,029,096	490,399,349	1,987,428,445	99.39 %	12,102,555
525112	Belanja Barang	1,999,531,000	0	1,497,029,096	490,399,349	1,987,428,445	99.39 %	12,102,555
052.0C	Penagihan PHBP (Subbag.TU)	16,290,000	0	4,466,000	4,799,000	9,265,000	56.88 %	7,025,000
525115	Belanja Perjalanan	16,290,000	0	4,466,000	4,799,000	9,265,000	56.88 %	7,025,000
052.0D	Operasional Perjalanan UPPPFK Palembang (UPPPFK)	99,900,000	0	47,079,381	31,853,481	78,932,862	79.01 %	20,967,138
525115	Belanja Perjalanan	99,900,000	0	47,079,381	31,853,481	78,932,862	79.01 %	20,967,138
052.0E	Kegiatan Akreditasi: Surveilien KAN ke BPFK (Sekai TAOP)	384,946,000	0	187,511,500	138,483,984	325,995,484	89.33 %	38,950,516
525112	Belanja Barang	24,506,000	0	15,197,500	5,772,200	20,969,700	85.57 %	3,536,300
525115	Belanja Perjalanan	153,440,000	0	52,814,000	76,711,784	129,525,784	84.41 %	23,914,216
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	187,000,000	0	119,500,000	56,000,000	175,500,000	93.85 %	11,500,000
052.0F	Tindakan Perbaikan Surveilien KAN Lab Pengujian SNI 17025, dan PUP SNI 17043 (Sekai Taop)	110,572,000	0	40,500,000	67,922,000	108,422,000	98.06 %	2,150,000
525112	Belanja Barang	500,000	0	0	200,000	200,000	40.00 %	300,000
525113	Belanja Jasa	6,400,000	0	0	6,300,000	6,300,000	98.44 %	100,000
525115	Belanja Perjalanan	103,672,000	0	40,500,000	61,422,000	101,922,000	98.31 %	1,750,000

052.0G	Kegiatan Akreditasi dan Perpanjangan Ijin (Seksi TAOP)	51,280,000	0	22,444,655	6,336,000	28,780,655	56.12 %	22,498,345
525112	Belanja Barang	3,880,000	0	0	3,336,000	3,336,000	85.98 %	544,000
525115	Belanja Perjalanan	23,300,000	0	3,059,655	1,500,000	4,559,655	19.57 %	18,740,345
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	24,100,000	0	19,385,000	1,500,000	20,885,000	86.66 %	3,215,000
052.0H	Kegiatan Akreditasi : Audit Internal (Seksi TAOP)	17,968,000	0	17,850,000	0	17,850,000	99.34 %	118,000
525115	Belanja Perjalanan	17,968,000	0	17,850,000	0	17,850,000	99.34 %	118,000
052.0I	Interkomparasi Lab. Pemantauan Dosis Perorangan dan Lab	49,717,000	0	48,650,987	0	48,650,987	97.86 %	1,066,013

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

052.0I	Kalibrasi AUR (Seksi TAOP)	49,717,000	0			48,650,987	97.86 %	1,066,013
525115	Belanja Perjalanan	49,646,000	0	48,650,987	0	48,650,987	98.00 %	995,013
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	71,000	0	0	0	0	0.00 %	71,000
052.0J	Kegiatan Penyusunan Metode Kerja/Instruksi Kerja/Lembar Kerja dan Revisi SOP-AP (Seksi TAOP)	335,009,000	0	317,061,140	16,746,976	333,808,116	99.64 %	1,200,884
525112	Belanja Barang	1,335,000	0	1,077,500	0	1,077,500	80.71 %	257,500
525113	Belanja Jasa	13,600,000	0	13,500,000	0	13,500,000	99.26 %	100,000
525115	Belanja Perjalanan	320,074,000	0	302,483,640	16,746,976	319,230,616	99.74 %	843,384
052.0K	Kegiatan Tinjauan Manajemen (Seksi TAOP)	144,054,000	0	0	119,254,000	119,254,000	82.78 %	24,800,000
525112	Belanja Barang	350,000	0	0	250,000	250,000	71.43 %	100,000
525113	Belanja Jasa	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	100.00 %	0
525115	Belanja Perjalanan	141,004,000	0	0	116,304,000	116,304,000	82.48 %	24,700,000
052.0L	Kegiatan Uji Coba Metode/Instruksi Kerja/Lembar Kerja (Seksi TAOP)	64,700,000	0	0	63,726,000	63,726,000	98.49 %	974,000
525113	Belanja Jasa	11,300,000	0	0	10,800,000	10,800,000	95.58 %	500,000
525115	Belanja Perjalanan	53,400,000	0	0	52,926,000	52,926,000	99.11 %	474,000
052.0M	Pengembangan Laboratorium dan Pertemuan Teknis laboratorium (Seksi TAOP)	123,880,000	0	59,046,616	63,746,592	122,793,208	99.12 %	1,086,792
525112	Belanja Barang	4,600,000	0	1,943,600	1,785,600	3,729,200	81.07 %	870,800
525113	Belanja Jasa	15,300,000	0	0	15,300,000	15,300,000	100.00 %	0
525115	Belanja Perjalanan	103,980,000	0	57,103,016	46,660,992	103,764,008	99.79 %	215,992
052.0N	Kegiatan Uji banding /Uji Profisiensi laboratorium (Seksi TAOP)	32,920,000	0	9,093,750	12,444,958	21,538,708	65.43 %	11,381,292
525115	Belanja Perjalanan	30,870,000	0	7,068,000	12,444,958	19,512,958	63.21 %	11,357,042
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2,050,000	0	2,025,750	0	2,025,750	98.82 %	24,250
052.0O	Penyelenggaraan Uji Profisiensi (UP) (Seksi TAOP)	7,908,000	0	0	0	0	0.00 %	7,908,000
525112	Belanja Barang	2,208,000	0	0	0	0	0.00 %	2,208,000
525113	Belanja Jasa	2,700,000	0	0	0	0	0.00 %	2,700,000
525115	Belanja Perjalanan	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

052.0P	Pemiparan Hasil Uji Profisiensi (UP) (Seksi TAOP) di BPPK Jakarta	45,262,000	0	0	34,008,000	34,008,000	75.14 %	11,254,000
525112	Belanja Barang	11,062,000	0	0	1,950,000	1,950,000	17.63 %	9,112,000
525113	Belanja Jasa	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	100.00 %	0
525115	Belanja Perjalanan	31,500,000	0	0	29,358,000	29,358,000	93.20 %	2,142,000
052.0Q	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pengujian / Kalibrasi dan Inspeksi (Seksi TAOP)	36,752,000	0	14,020,700	20,438,420	34,460,120	93.76 %	2,291,880
525115	Belanja Perjalanan	36,752,000	0	14,020,700	20,438,420	34,460,120	93.76 %	2,291,880

052.0R	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Lintas Program dan Sektor (Seksi TAOP)	142,490,000	0	15,103,000	70,307,857	85,410,857	59.94 %	57,079,143
525115	Belanja Perjalanan	142,490,000	0	15,103,000	70,307,857	85,410,857	59.94 %	57,079,143
052.0S	Workshop Pengujian dan Kalibrasi untuk Peningkatan Mutu Layanan di Rumah sakit (Seksi Bimtek)	34,215,000	0	33,630,194	0	33,630,194	99.29 %	584,806
525112	Belanja Barang	12,775,000	0	12,770,194	0	12,770,194	99.96 %	4,806
525113	Belanja Jasa	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00 %	0
525115	Belanja Perjalanan	17,840,000	0	17,260,000	0	17,260,000	96.75 %	580,000
052.0T	Bimbingan Teknis terhadap Instansi Penguji Alat Kesehatan dan UPF PFK Palembang (Seksi Bimtek)	15,244,000	0	0	15,242,250	15,242,250	99.99 %	1,750
525115	Belanja Perjalanan	15,244,000	0	0	15,242,250	15,242,250	99.99 %	1,750
052.0U	Temu Pelanggan BPFK Jakarta-Forum Komunikasi Publik (Seksi Bimtek)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
525112	Belanja Barang	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
052.0V	Webinar Teknis (Kalibrasi Alkes, Lembaga Inspeksi, Ukes dan AUSR) (Seksi Bimtek)	4,580,000	0	4,580,000	0	4,580,000	100.00 %	0
525112	Belanja Barang	3,680,000	0	3,680,000	0	3,680,000	100.00 %	0
525113	Belanja Jasa	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00 %	0
052.0W	Jejaring Kerja/Kemitraan	10,271,000	0	8,282,000	1,040,000	9,322,000	90.76 %	949,000
525112	Belanja Barang	1,989,000	0	0	1,040,000	1,040,000	52.29 %	949,000
525115	Belanja Perjalanan	8,282,000	0	8,282,000	0	8,282,000	100.00 %	0
052.0X	Kegiatan Pameran dan Kehumasan BPFK Jakarta	266,262,000	0	124,216,350	140,345,870	264,562,220	99.36 %	1,699,780
525112	Belanja Barang	169,705,000	0	94,516,350	73,806,050	168,322,400	99.19 %	1,382,600

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

525115	Belanja Perjalanan	75,348,000	0	8,610,000	66,539,820	75,149,820	99.74 %	198,180
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	21,209,000	0	21,090,000	0	21,090,000	99.44 %	119,000
052.0Y	Kegiatan Survey/Koordinasi/Evaluasi MOU Pelayanan BPFK Jakarta (Seksi Yantek)	169,152,000	0	99,363,347	20,465,000	119,828,347	70.84 %	49,323,653
525115	Belanja Perjalanan	169,152,000	0	99,363,347	20,465,000	119,828,347	70.84 %	49,323,653
052.0Z	Penyusunan dan Revisi Pola Tarif BLU BPFK Jakarta di BPFK Jakarta	169,630,000	0	169,009,000	0	169,009,000	99.63 %	621,000

537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	39,380,000	0	15,376,226	19,727,003	35,103,229	89.14 %	4,276,771
053.0C	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	259,327,000	0	0	257,765,550	257,765,550	99.40 %	1,561,450
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242,901,000	0	0	242,775,000	242,775,000	99.95 %	126,000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	16,428,000	0	0	14,990,550	14,990,550	91.26 %	1,435,450

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	990,434,000	0	908,888,475	73,074,777	981,963,252	99.14 %	8,470,748
EBC.001	Layanan Kepegawaian Sattier UPT Vertikal	990,434,000	0	908,888,475	73,074,777	981,963,252	99.14 %	8,470,748
051	Layanan Kepegawaian satter UPT Vertikal - BLU	990,434,000	0	908,888,475	73,074,777	981,963,252	99.14 %	8,470,748
051.0A	Penyelenggaraan Inhouse Training peningkatan kompetensi SDM Teknis dan Manajemen BPFK Jakarta (Seksi Bmtek)	172,259,000	0	141,312,053	30,532,700	171,844,753	99.76 %	414,247
525112	Belanja Barang	31,269,000	0	24,406,053	6,652,700	31,058,753	99.33 %	210,247
525113	Belanja Jasa	63,000,000	0	41,400,000	21,600,000	63,000,000	100.00 %	0
525115	Belanja Perjalanan	26,290,000	0	23,806,000	2,280,000	26,086,000	99.22 %	204,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	51,700,000	0	51,700,000	0	51,700,000	100.00 %	0
051.0B	Peningkatan Kompetensi Teknis SDM UPF-PFK Palembang	32,221,000	0	25,258,021	5,939,177	31,197,198	96.82 %	1,023,802
525112	Belanja Barang	4,891,000	0	4,884,800	0	4,884,800	99.87 %	6,200
525115	Belanja Perjalanan	20,430,000	0	13,473,221	5,939,177	18,412,398	95.02 %	1,017,602
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	100.00 %	0
051.0C	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Teknis dan Manajemen	203,906,000	0	185,177,000	18,632,100	203,809,100	99.95 %	96,900
525115	Belanja Perjalanan	15,373,000	0	10,747,000	4,530,000	15,277,000	98.38 %	96,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	188,533,000	0	174,430,000	14,102,100	188,532,100	100.00 %	900
051.0D	Penyelenggaraan Pelatihan Kalibrasi Alkes Lowrisk (BPFK Academy)	24,373,000	0	0	17,970,800	17,970,800	73.73 %	6,402,200
525112	Belanja Barang	12,849,000	0	0	11,820,800	11,820,800	91.29 %	1,128,200
525115	Belanja Perjalanan	11,424,000	0	0	6,150,000	6,150,000	53.83 %	5,274,000
051.0E	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BPFK Jakarta ke Yogyakarta	557,675,000	0	557,141,401	0	557,141,401	99.90 %	533,599
525115	Belanja Perjalanan	432,675,000	0	432,641,401	0	432,641,401	99.99 %	33,599
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	125,000,000	0	124,500,000	0	124,500,000	99.60 %	500,000
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	34,647,991,000	0	0	34,633,741,712	34,633,741,712	99.96 %	14,249,288
RAB.007	Alat Kalibrasi - (LR-12)	34,647,991,000	0	0	34,633,741,712	34,633,741,712	99.96 %	14,249,288
051	Pengadaan Alat Kalibrasi	34,647,991,000	0	0	34,633,741,712	34,633,741,712	99.96 %	14,249,288
051.0A	Pemanfaatan Sisa Anggaran Pengadaan Obat dan Vaksin DiJen Farmalkes	33,732,211,000	0	0	33,718,349,878	33,718,349,878	99.96 %	13,861,122

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,699,818,000	0	0	33,699,665,885	33,699,665,885	100.00 %	152,115
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	32,393,000	0	0	18,683,993	18,683,993	57.68 %	13,709,007
051.0B	Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi (Perpeseran)	915,780,000	0	0	915,391,834	915,391,834	99.96 %	388,166
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	915,780,000	0	0	915,391,834	915,391,834	99.96 %	388,166
WA	Program Dukungan Manajemen	18,444,245,000	0	15,303,974,003	2,807,640,841	18,111,614,844	98.20 %	332,630,156
WA.4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di DiJen Pelayanan Kesehatan	18,444,245,000	0	15,303,974,003	2,807,640,841	18,111,614,844	98.20 %	332,630,156
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18,061,705,000	EBA	15,053,494,003	2,678,915,041	17,732,409,044	98.18 %	329,295,956
EBA.962	Layanan Umum	242,460,000	0	187,566,364	1,500,000	189,066,364	77.98 %	53,393,636
059	Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Vertikal DiJen Yankes	242,460,000	0	187,566,364	1,500,000	189,066,364	77.98 %	53,393,636

059.0A	Pembinaan Program dan Pertemuan Lintas Sektoral/Konsultasi dan Koordinasi (Subbag.TU)	242,460,000	0	187,566,364	1,500,000	189,066,364	77.98 %	53,393,636
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,500,000	0	3,288,000	0	3,288,000	93.94 %	212,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215,580,000	0	176,532,984	0	176,532,984	81.89 %	39,047,016
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,260,000	0	1,800,000	1,500,000	3,300,000	20.30 %	12,960,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,220,000	0	4,090,000	0	4,090,000	78.35 %	1,130,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,900,000	0	1,855,380	0	1,855,380	97.65 %	44,620
<b>EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>17,819,245,000</b>	<b>0</b>	<b>14,865,927,639</b>	<b>2,677,415,041</b>	<b>17,543,342,680</b>	<b>98.45 %</b>	<b>275,902,320</b>
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>11,961,794,000</b>	<b>0</b>	<b>10,436,580,821</b>	<b>1,462,437,202</b>	<b>11,899,018,023</b>	<b>99.48 %</b>	<b>62,775,977</b>
001.0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	11,819,539,000	0	10,382,818,798	1,374,559,243	11,757,378,041	99.47 %	62,160,959
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,072,464,000	0	3,783,102,400	288,861,200	4,071,963,600	99.99 %	500,400
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	67,000	0	61,418	4,574	65,992	98.50 %	1,008
511121	Belanja Tunj. Suamistri PNS	328,756,000	0	304,936,290	23,817,660	328,753,950	100.00 %	2,050
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	106,494,000	0	98,881,748	7,608,906	106,490,654	100.00 %	3,346
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0	23,400,000	1,800,000	25,200,000	100.00 %	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	364,844,000	0	336,718,000	28,126,000	364,844,000	100.00 %	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	17,679,000	0	15,369,575	2,307,317	17,676,892	99.99 %	2,108
<b>*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAIPOK selesai menjadi DIPA.</b>								
<b>*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir</b>								
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	262,306,000	0	243,693,300	18,611,940	262,305,240	100.00 %	760
511129	Belanja Uang Makan PNS	470,746,000	0	379,802,000	73,338,000	453,140,000	96.26 %	17,606,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	326,400,000	0	302,550,000	23,850,000	326,400,000	100.00 %	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	122,920,000	0	114,975,000	7,940,000	122,915,000	100.00 %	5,000
512211	Belanja Uang Lembur	59,460,000	0	0	15,422,000	15,422,000	25.94 %	44,038,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,662,203,000	0	4,779,329,067	882,871,646	5,662,200,713	100.00 %	2,287
001.0B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (PPPK)	142,255,000	0	53,762,023	87,877,959	141,639,982	99.57 %	615,018
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	51,801,000	0	43,220,300	8,580,200	51,800,500	100.00 %	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,000	0	433	174	607	30.35 %	1,393
511621	Belanja Tunjangan Suamistri PPPK	2,374,000	0	2,076,550	296,650	2,373,200	99.97 %	800
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,246,000	0	1,067,940	177,990	1,245,930	99.99 %	70
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,700,000	0	4,500,000	1,200,000	5,700,000	100.00 %	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,404,000	0	2,896,800	506,940	3,403,740	99.99 %	260
511628	Belanja Uang Makan PPPK	12,802,000	0	0	12,191,000	12,191,000	95.23 %	611,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	64,926,000	0	0	64,925,005	64,925,005	100.00 %	995
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>5,657,451,000</b>	<b>0</b>	<b>4,429,346,818</b>	<b>1,214,977,839</b>	<b>5,644,324,657</b>	<b>96.36 %</b>	<b>213,126,343</b>
002.0A	Langganan Daya dan Jasa	597,803,000	0	527,728,101	63,359,579	591,087,680	98.88 %	6,715,320
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,000,000	0	940,000	0	940,000	47.00 %	1,060,000
522111	Belanja Langganan Listrik	408,603,000	0	376,281,445	32,321,267	408,602,712	100.00 %	288
522112	Belanja Langganan Telepon	8,000,000	0	3,066,202	289,488	3,355,690	41.95 %	4,644,310
522113	Belanja Langganan Air	11,200,000	0	7,629,294	3,553,824	11,183,118	99.85 %	16,882
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	168,000,000	0	139,811,160	27,195,000	167,006,160	99.41 %	993,840
002.0B	Perawatan/Pemeliharaan Gedung Kantor	112,376,000	0	87,698,940	18,755,035	106,453,975	94.73 %	5,922,025
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112,376,000	0	87,698,940	18,755,035	106,453,975	94.73 %	5,922,025

002.0C	Perawatan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	236,350,000	0	191,334,044	43,785,932	235,119,976	99.48 %	1,230,024
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236,350,000	0	191,334,044	43,785,932	235,119,976	99.48 %	1,230,024
<b>*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.</b>								
<b>*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir</b>								
002.0D	Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	14,400,000	0	8,700,000	1,740,000	10,440,000	72.50 %	3,960,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	14,400,000	0	8,700,000	1,740,000	10,440,000	72.50 %	3,960,000
002.0E	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	715,701,000	0	552,927,348	104,238,345	657,166,693	91.82 %	58,534,307
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	122,550,000	0	107,488,204	9,607,892	117,096,096	95.55 %	5,453,904
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	90,000,000	0	74,988,600	15,003,000	89,971,600	99.97 %	28,400
521211	Belanja Bahan	50,000,000	0	19,739,610	1,292,378	21,031,986	42.08 %	28,968,014
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	430,651,000	0	340,111,034	70,933,077	411,044,111	95.45 %	19,606,889
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,500,000	0	10,619,900	7,403,000	18,022,900	80.10 %	4,477,100
002.0F	Pemeliharaan Sarana Kantor	278,740,000	0	170,510,282	66,649,835	237,160,117	85.08 %	41,579,883
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	278,740,000	0	170,510,282	66,649,835	237,160,117	85.08 %	41,579,883
002.0G	Honor Pengelola Anggaran	121,440,000	0	99,340,000	22,100,000	121,440,000	100.00 %	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	121,440,000	0	99,340,000	22,100,000	121,440,000	100.00 %	0
002.0H	Operasional Pimpinan	272,528,000	0	239,085,382	11,943,157	251,028,539	92.11 %	21,499,461
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,500,000	0	68,195,804	11,943,157	80,138,961	78.95 %	21,361,039
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	171,028,000	0	170,889,578	0	170,889,578	99.92 %	138,422
002.0I	Penambah Daya Tahan Tubuh	198,000,000	0	160,311,195	36,923,040	197,234,235	99.61 %	765,765
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	198,000,000	0	160,311,195	36,923,040	197,234,235	99.61 %	765,765
002.0J	Pakaian Seragam	81,672,000	0	81,644,940	0	81,644,940	99.97 %	27,060
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	81,672,000	0	81,644,940	0	81,644,940	99.97 %	27,060
002.0K	Pemeriksaan Kesehatan	224,174,000	0	33,642,000	183,255,000	216,897,000	96.75 %	7,277,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	205,124,000	0	17,892,000	182,355,000	200,247,000	97.62 %	4,877,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,050,000	0	15,750,000	900,000	16,650,000	87.40 %	2,400,000
002.0L	Jamuan Tamu/Rapat Rutin	60,300,000	0	55,709,050	4,057,000	59,766,050	99.11 %	533,950
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	60,300,000	0	55,709,050	4,057,000	59,766,050	99.11 %	533,950
002.0M	Pengadaan Petugas Satpam/Security/Pengemudi/Petugas Kebersihan (Outsourcing)	1,452,000,000	0	1,210,000,000	242,000,000	1,452,000,000	100.00 %	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,452,000,000	0	1,210,000,000	242,000,000	1,452,000,000	100.00 %	0
<b>*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.</b>								
<b>*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir</b>								
002.0N	Honor PPNPN Pramubakti dan Pengemudi	205,699,000	0	174,053,000	31,646,000	205,699,000	100.00 %	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	205,699,000	0	174,053,000	31,646,000	205,699,000	100.00 %	0
002.0O	Operasional UPF-PFK Palembang	387,310,000	0	253,543,420	99,615,264	353,158,684	91.18 %	34,151,316
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	91,789,000	0	45,652,860	27,655,594	73,308,454	79.87 %	18,480,546
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	40,555,000	0	33,136,720	7,200,000	40,336,720	99.46 %	218,280
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,500,000	0	2,088,000	597,000	2,685,000	76.14 %	835,000
522111	Belanja Langganan Listrik	54,000,000	0	48,651,800	4,065,400	52,717,200	97.62 %	1,282,800
522112	Belanja Langganan Telepon	14,000,000	0	9,952,840	2,011,450	11,964,290	85.46 %	2,035,710
522141	Belanja Sewa	84,504,000	0	84,469,440	0	84,469,440	99.96 %	34,560
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,750,000	0	7,550,150	46,060,550	53,610,700	88.25 %	7,139,300

523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,212,000	0	22,061,610	12,025,270	34,086,880	89.20 %	4,125,120
002.0P	Pemeliharaan Alat Pengujian kalibrasi (Tata Operasional)	898,958,000	0	583,119,116	284,908,652	868,027,768	96.56 %	30,930,232
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	836,100,000	0	528,962,677	283,652,652	812,615,329	97.19 %	23,484,671
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,858,000	0	52,806,439	656,000	53,462,439	89.32 %	6,395,561
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	1,350,000	600,000	1,950,000	65.00 %	1,050,000
<b>EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>295,000,000</b>	<b>0</b>	<b>174,250,000</b>	<b>119,965,800</b>	<b>294,215,800</b>	<b>99.73 %</b>	<b>784,200</b>
<b>EBB.971</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>295,000,000</b>	<b>0</b>	<b>174,250,000</b>	<b>119,965,800</b>	<b>294,215,800</b>	<b>99.73 %</b>	<b>784,200</b>
<b>052</b>	<b>Gedung perkantoran UPT Vertikal Diijen Yanikes</b>	<b>295,000,000</b>	<b>0</b>	<b>174,250,000</b>	<b>119,965,800</b>	<b>294,215,800</b>	<b>99.73 %</b>	<b>784,200</b>
052.0A	Biaya Konsultan	205,000,000	0	174,250,000	30,750,000	205,000,000	100.00 %	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	205,000,000	0	174,250,000	30,750,000	205,000,000	100.00 %	0
052.0B	Pengadaan Tambah Daya Listrik Meubelair	90,000,000	0	0	89,215,800	89,215,800	99.13 %	784,200
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,658,000	0	0	49,875,300	49,875,300	98.45 %	783,700
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	39,341,000	0	0	39,340,500	39,340,500	100.00 %	500
<b>FAD</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>87,540,000</b>	<b>0</b>	<b>76,230,000</b>	<b>8,760,000</b>	<b>84,990,000</b>	<b>97.09 %</b>	<b>2,550,000</b>
<b>FAD.001</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran UPT Vertikal</b>	<b>87,540,000</b>	<b>0</b>	<b>76,230,000</b>	<b>8,760,000</b>	<b>84,990,000</b>	<b>97.09 %</b>	<b>2,550,000</b>
<b>051</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran UPT Vertikal</b>	<b>87,540,000</b>	<b>0</b>	<b>76,230,000</b>	<b>8,760,000</b>	<b>84,990,000</b>	<b>97.09 %</b>	<b>2,550,000</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

051.0A	Pembahasan Internal dan Revisi RKAKL (Subbag.TU)	87,540,000	0	76,230,000	8,760,000	84,990,000	97.09 %	2,550,000
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,560,000	0	0	8,760,000	8,760,000	82.95 %	1,800,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,580,000	0	70,830,000	0	70,830,000	98.95 %	750,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

### 3. SK LAKIP



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) JAKARTA  
Jl. Percetakan Negara No. 23A Jakarta Pusat 10570  
Telp. : (021) 4240406, 42882249, Fax. : (021) 4244168, 42882237  
Email : kontak@bpfkjakarta.or.id – Website : <https://bpfkjakarta.or.id>



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA  
NOMOR : PR.05.04/D.LIII/13929/2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DAN PENETAPAN KINERJA  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

**KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan yang perlu dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan dan menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007 dan perubahannya No. No. 2351/Menkes/Per/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perecepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/1568/12 tanggal, 28 Agustus 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILAS KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim adalah sebagai berikut :

Pelindung : Kepala BPFK Jakarta  
 Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
 Anggota : 1. Koordinator Tata Operasional  
 2. Koordinator Pelayanan Teknis  
 3. Koordinator Kemitraan dan Bimtek

Sekretariat : 1. Ka. Instalasi Lab. Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan  
 2. Ka. Instalasi Lab. Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray  
 3. Ka. Instalasi Lab. Pengujian/ Kalibrasi/ Inspeksi Sarana Prasarana (SP)  
 4. Ka. Instalasi Lab. Kalibrasi Aalat Ukur Standar dan Kalibrator Alat Kesehatan  
 5. Ka. Instalasi Lab. Uji Produk  
 6. Ka. Instalasi Lab. Dosimetri  
 7. Yeni Utirah Kusdiana,SE. (Admnitrasi Umum)

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data atau bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai pertanggungjawaban Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
3. Menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
4. Melakukan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta

5. Menyusun laporan berkala BPFK Jakarta (Bulanan, semesteran dan tahunan)
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja bertanggung jawab kepada kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dibebankan kepada DIPA Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dan perubahan terkait kebijakan atau regulasi yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 29 Desember 2023  
**KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS  
KESEHATAN JAKARTA,**



**Subadri, ST.M.Si.**  
**NIP.197611122005011003**